

DAFTAR RUJUKAN

Buku

- Abdurrahman, Soejono. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grasindo Persada.
- Andrisman, Tri. 2007. *Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung: UNILA.
- Anonim, 1997. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Departemen Pendidikan Kebudayaan: Balai Pustaka.
- Amirrudin dan Asikin, H. Zainal. 2018. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Depok: Rajawali Pers.
- Ali, Achmad. 2007. *Menguak Teori Hukum Legal Theory dan Teori Peradilan Judicialprudence*. Makasar: Kencana.
- Ali, Achmad dan Heryani, Wiwie. *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Amiruddin dan Asikin, Zainal. 2016. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Bahri, Zainul. 1996. *Kamus Umum Khususnya Bidang Hukum dan Politik*. Bandung: Angkasa.
- Efendi, Jonaedi. 2018. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*. Depok: Prenadamedia Group.
- Effendi, Tolib. 2013. *Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Harahap, M. Yahya. 2012. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. 2005. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP- Penyidikan dan Penuntutan*. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. 2010. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi. 2001. *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Hamzah, Andi. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi. 2016. *Hukum Acara Pidana Di Indonesia Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Husin, Kadri dan Husin, Budi Rizki. 2016. *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jaya, Ida Bagus Surya Dharma. dkk. 2016. *Klinik Hukum Pidana Komponen Persiapan dan Praktek*. Denpasar: Udayana University Press.
- Lamintang, P.A.F. dan Lamintang, Theo. 2013. *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Manan, Bagir. 2016. *Pers. Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Dewan Pers.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Marwan, M. dan Jimmy. 2009. *Kamus Hukum*. Yogyakarta: Gama Press.
- Muhammad, Rusli. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Mulyadi, Lilik. 2012. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mertokusumo, Sudikno. 2010. *Hukum Acara Perdata*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Pangaribuan, Luhut. 2016. *Hukum Acara Pidana dan Hakim Ad-Hoc*. Jakarta: Papas Sinar Sinanti.
- Renggong, Ruslan. 2014. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Reksodiputro, Mardjono. 1994. *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum. Lembaga Kriminologi U.I.
- Soeroso, R. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Salim, Faisal Moch. 2001. *Hukum Acara Pidana dalam Teori Praktek*. Cetakan 1. Bandung: Mandar Maju.

Sasangka, Hari dan Rosita, Lily. 2003. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju.

Sidharta, B. Arif. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni.

Suharto dan Efendi, Jonaedi. 2013. *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Susanto, Edy. 2010. *Hukum Pers di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sumadiria, A.S. Haris. 2016. *Hukum dan Etika Media Massa*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Suseno, Sigid dan Putri, Nella Sumika. 2013. *Hukum Pidana Indonesia Perkembangan dan Pembaruan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. 1995. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Cet. 4. Jakarta: Rajawali Press.

Soekanto, Soerjono dalam Sidik Sunaryo. 2004. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Malang: UMM Press.

Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. 2003. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grasindo Persada.

Sofyan, Andi Muhammad dan Asis, Abd. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana.

Tugas Akhir, Skripsi, Tesis, Disertasi

Aswad, Nursar. 2018. *Tinjauan Yuridis Penyiaran Sidang Peradilan Secara Langsung Oleh Pers dan Media Menurut Hukum Acara Pidana dan Hukum Media dan Pers Serta Penyiaran*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.

Fachrurrozi, Irfan. 2018. "Dampak Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2002 Tentang Perekaman Proses Persidangan Terhadap Keterangan Saksi Dalam Persidangan". Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.

Hariyanto, 2015. *Praktik Courtroom Television Dalam Membentuk Opini Publik dan Pengaruhnya Terhadap Putusan Pengadilan*. Kementerian Agama. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Institut Agama Islam. Purwokerto.

Mahasena, Adhyaksa. 2018. *Tindak Pidana Jual Beli Organ Tubuh Manusia dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana*. Tesis Fakultas Hukum Universitas Udayana. Denpasar.

Pradoko, Timur. 2019. *Prinsip Independensi Hakim Terhadap Hak Keterbukaan Informasi dalam Penayangan Persidangan Perkara Pidana di Televisi*. Tesis Fakultas Hukum Universitas Jember. Jawa Timur.

Situmorang, Mosgan. 2013. *Penelitian Hukum Tentang Pengaruh Pratik Courtroom Television terhadap independensi Pengadilan*. Badan Pembinaan Hukum Nasional. Kementerian Hukum dan HAM RI. Jakarta.

Wicaksono, Reka Bagus. 2012. *Trial By Press Yang Mengakibatkan Pencemaran Nama Baik*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Surabaya.

Artikel dalam Jurnal

Adonara, Firman Floranta. 2015. "Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara sebagai Amanat Konstitusi". *Jurnal Konstitusi*, Volume 12. Nomor 2. Juni 2015 (hlm. 227).

Ahmad, Kamri dan Djanggih, Hardianto. 2017. "Batasan Penerapan Asas sidang terbuka untuk umum dalam Siaran Persidangan Pidana oleh Media". Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* No. 3 Vol. 24 Juli 2017 (hlm. 489).

Arianta, Ketut. Mangku, Dewa Gede Sudika. dan Yuliantini, Ni Putu Rai. 2018. "Perlindungan Hukum Bagi Kaum Etnis Rohingya dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional". Tersedia pada <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/13701/8528>. (hlm. 04)

Darmawan, Budi. 2018. "Pemeriksaan Saksi Perkara Pidana Yang Disiarkan Secara Langsung Oleh Media Elektronik". *RechtIdee*. Vol. 3, No. 2. Desember 2018 (hlm. 235, 241).

Hariyanto, 2016. "*Praktik Courtroom Television* Dalam Membentuk Opini Publik Dan Pengaruhnya Terhadap Putusan Pengadilan" *JPA*. Volume 17 Nomor 1. Januari-Juni 2016 (hlm. 141).

Manan, Bagir. dkk. 2010. "Asas Praduga Tidak Bersalah dalam Praktek Pers". Edisi No. 2 November 2010 (hlm. 61).

Syahputra, Azmi. 2015. "Fungsi dan Kedudukan Advokat sebagai Penegak Hukum dan Penemu Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana". Jurnal Hukum PRIORIS. Vol. 4 No. 3 Tahun 2015 (hlm. 286).

Yuliartini, Ni Putu Rai. 01 Februari 2015. "Kedudukan Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)". Tersedia pada <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/5006/774> (hlm. 2).

Artikel dalam Internet

Almas, Putrid an Firmansyah, Teguh. 12 Juni 2016. "Sejarah hari ini: Pembunuhan Brutal Mantan Istri Pesepak Bola Yang Akhirnya Terkuak". Tersedia pada <https://www.republika.co.id/berita/o8mojn377/sejarah-hari-ini-pembunuhan-brutal-mantan-istri-pesepak-bola-yang-akhirnya-terkuak>. (diakses tanggal 02 Desember 2019, pukul 13.00 WITA).

Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2002. "Naskah Akademik Penelitian *Contempt of Court*". Tersedia pada <https://bldk.mahkamahagung.go.id/pusdiklat-teknis-peradilan/publikasi-diklat-teknis/53-puslitbang-kumdil/publikasi-litbang/200-naskah-akademis-penelitian-contempt-of-court.html>. (diakses tanggal 01 Januari 2020, pukul 18.00 WITA).

BBC, 13 Desember 2016. "Sidang Kasus Ahok: Perluah Siaran Langsung Televisi, Mengapa?". Tersedia pada <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-38291620>. (diakses tanggal 03 Desember, pukul 13.40 WITA).

BBC, 15 Agustus 2016. "Pemberitaan Sidang Jessica Wongso 'berpotensi giring opini publik'". Tersedia pada https://www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/08/160815_trensosial_jessica. (diakses tanggal 03 Desember 2019, pukul 15.00 WITA).

BBC, 27 Oktober 2016. "Ekspektasi publik dikhawatirkan berbeda dengan putusan Kasus Jessica Wongso". Tersedia pada <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-37778944>. (diakses tanggal 04 Desember 2019, pukul 16.30 WITA).

Dewan Pers, 2013. "Kode Etik Jurnalistik". Tersedia pada https://dewanpers.or.id/assets/ebook/buku/822-Buku%20Pers%20berkualitas%20masyarakat%20Cerdas_final.pdf. (diakses tanggal 02 Januari 2020, pukul 09.00 WITA).

Destryawan, Dennis. 13 Desember 2016. "Majelis Hakim Minta Sidang Pembuktian Ahok tak disiarkan langsung Televisi". Tersedia pada <https://batam.tribunnews.com/2016/12/13/majelis-hakim-minta-sidang->

pembuktian-ahok-tak-disiarkan-langsung-televisi?page=2. (diakses tanggal 04 Desember 2019, pukul 15.40 WITA).

Dhani, Arman. 06 September 2016. “Ketika Media Turut “Membebaskan” Tersangka”. Tersedia pada <https://tirto.id/ketika-media-turut-membebaskan-tersangka-bGZx>. (diakses tanggal 01 Desember 2019, pukul 12.00 WITA).

Dharmastuti, Hestiana. 22 Juni 2018. “Perjalanan Kasus Aman Abdurrahman Hingga Divonis Hukuman Mati”. Tersedia pada <https://news.detik.com/berita/d-4077837/perjalanan-kasus-aman-abdurrahman-hingga-divonis-hukuman-mati>. (diakses tanggal 03 Desember 2019, pukul 15.00 WITA).

DZA, 22 Juni 2018. “Kamera masih diperbolehkan masuk di Sidang Aman Abdurrahman”. Tersedia pada <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180621194952-12-307890/kamera-masih-diperbolehkan-masuk-di-sidang-aman-abdurrahman>. (diakses tanggal 03 Desember 2019, pukul 14.00 WITA).

Fadhil, Moh. 17 Desember 2016. “Menilai Persidangan *Live*, Antara Keterbukaan dan Implikasi *Trial by the Press*”. Tersedia pada <https://www.kompasiana.com/fadhiel Duffy/5854ef87b07e617174993fab/menilai-persidangan-live-antara-keterbukaan-dan-implikasi-trial-by-the-press>. (diakses tanggal 05 Desember 2019, pukul 18.00 WITA).

Florence, Ursula. 20 Oktober 2016. “Sidang Jessica, opini publik, dan wajah peradilan Indonesia”. Tersedia pada <https://www.rappler.com/indonesia/-sidang-jessica-oleh-media-massa>. (diakses tanggal 29 September 2019, pukul 08.00 WITA).

HAG, 02 Februari 2015. “Sidang Tertutup, Bukan Sekedar Larangan Masuk Ruang Sidang”. Tersedia pada <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54cef128994d1/sidang-tertutup--bukan-sekedar-larangan-masuk-ruang-sidang/>. (diakses tanggal 02 Desember 2019, pukul 10.00 WITA).

Hanifan, Aqwam Fiazmi. 28 Oktober 2016. “Uang yang datang dari Drama Jessica di Televisi” Tersedia pada <https://tirto.id/uang-yang-datang-dari-drama-jessica-di-televisi-bYww>. (diakses tanggal 29 September 2019, pukul 07.00 WITA).

Hasanah, Sovia. 03 Februari 2017. “Arti Persidangan Terbuka unuk Umum”. Tersedia pada <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5891989a80d7d/arti-persidangan-terbuka-untuk-umum/>. (diakses tanggal 02 Desember 2019, pukul 11.00 WITA).

Hukum Online, 2019. “Rancangan Undang-Undang 2019”. Tersedia pada <https://m.hukumonline.com/pusatdata/detail/17797/node/481/rancangan-uu->

2019-kitab-undang-undang-hukum-pidana. (diakses tanggal 01 Januari 2020, pukul 19.00 WITA).

Komisi Penyiaran Indonesia, 22 Maret 2012. “Pedoman Perilaku Peyiaran dan Standar Program Siaran”. Tersedia pada http://www.kpi.go.id/download/regulasi/P3SPS_2012_Final.pdf. (diakses tanggal 02 Januari 2020, pukul 10.00 WITA).

Kompas, 26 Mei 2009. “Ada Pelanggaran Kode Etik Dalam Pemberitaan Kasus Antasari”. Tersedia pada <https://nasional.kompas.com/read/2009/05/26/18414584/ada.pelanggaran.kode.etik.dalam.pemberitaan.kasus.antasari>. (diakses tanggal 04 Desember 2019, pukul 13.00 WITA).

Legislation.gov.uk, 1925. “*Criminal Justice Act 1925*”. Tersedia pada <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/Geo5/15-16/86/section/41/2016-05-27>. (diakses tanggal 04 Desember 2019, pukul 16.00 WITA).

Mahkamah Agung, 27 Agustus 2012. “Surat Edaran Nomor 04 Tahun 2012”. Tersedia pada https://bawas.mahkamahagung.go.id/bawas_doc/doc/sema_04_2012.pdf. (diakses tanggal 02 Januari 2020, pukul 10.24 WITA).

Mardatillah, Aida. 20 Juli 2018. “Peliputan Proses Persidangan Tak Boleh Langgar Prinsip Peradilan”. Tersedia pada <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b50db452b476/peliputan-proses-persidangan-tak-boleh-langgar-prinsip-peradilan/>. (diakses tanggal 06 Desember 2019, pukul 15.30 WITA).

Mardatillah, Aida. 05 Agustus 2019. “Pentingnya UU *Contempt Of Court* untuk melindungi Kehormatan Pengadilan”. Tersedia pada <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d4806d3140ba/pentingnya-uu-contempt-of-court-untuk-lindungi-kehormatan-pengadilan/>. (diakses tanggal 05 Desember 2019, pukul 11.00 WITA).

Nay, 17 Agustus 2003. “Putusan Pengadilan Akan Terbuka Untuk Umum”. pada <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol8500/putusan-pengadilan-akan-terbuka-untuk-umum/> (diakses tanggal 02 Desember 2019, pukul 12.30.00 WITA).

Pramesti, Tri Jata Ayu. 30 Juni 2015. “Bolehkah Merekam Jalannya Persidangan?”. Tersedia pada <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt558aa9549e1ac/bolehkah-merekam-jalannya-persidangan>. (diakses tanggal 02 Januari 2020, pukul. 11.41 WITA)

- Parlina, In. 19 Februari 2011. "Trial By The Press". Tersedia pada <https://www.kompasiana.com/natama/550087aaa33311a96f511688/trial-by-the-press>. (diakses tanggal 15 Oktober 2019, pukul 18.00 WITA).
- Rahmat, Basuki dan Pratiwi, Priska Sari. 27 Oktober 2019. "Vonis Jessica Bersalah, Hakim Pakai Bukti Tak Langsung". Tersedia pada <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20161027180543-12-168489/vonis-jessica-bersalah-hakim-pakai-bukti-tak-langsung>. (diakses tanggal 01 Desember 2019, pukul 10.00 WITA).
- Siswanto dan Tanjung, Erick. 09 Desember 2016. "Dilema Siaran Langsung Televisi dalam Pengadilan Ahok". Tersedia pada <https://www.suara.com/news/2016/12/09/202010/dilema-siaran-langsung-televisi-dalam-pengadilan-ahok>. (diakses tanggal 04 Desember 2019, pukul 14.30 WITA).
- Sjariffudin, Amier. 13 September 2002. "Sidang Pengadilan Terbuka Untuk Umum". Tersedia pada perpustakaan.bappenas.go.id/. (diakses tanggal 01 Desember 2019, pukul 13.20 WITA).
- Tashandra, Nabilla. 04 Januari 2017. "Tanggapan KY atas Sejumlah Larangan di Persidangan Kasus Ahok". Tersedia pada <https://nasional.kompas.com/read/2017/01/04/23340231/tanggapan.ky.atas.sejumlah.larangan.di.persidangan.kasus.ahok.?page=all>. (diakses tanggal 05 Desember 2019, pukul 18.45 WITA).
- Qodar, Nafiysul. 28 Oktober 2019. "6 Fakta Menarik Sidang Vonis Jessica Wongso". Tersedia pada <https://www.liputan6.com/news/read/2637360/6-fakta-menarik-sidang-vonis-jessica-wongso>. (diakses tanggal 9 November 2019, pukul 18.00 WITA).
- Wajdi, Farid. 28 April 2019. "Polemik Siaran Langsung Persidangan". Tersedia pada <http://farid-wajdi.com/detailpost/polemik-siaran-langsung-persidangan>. (diakses tanggal 02 Desember 2019, pukul 12.30 WITA).
- Yahsyi, Asfahan. 09 Juni 2017. "Kronologi Kasus Ahok: Dari Penodaan Ke Pernyataan Permusuhan". Tersedia pada <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170509062010-15-213306/kronologi-kasus-ahok-dari-penodaan-ke-pernyataan-permusuhan>. (diakses tanggal 01 Desember 2019, pukul 11.00 WITA).

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209.

Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia Tahun 1950 atau Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713.

